

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arta, Yuni. Model Pengawasan Terhadap Jaksa dan Pegawai
Kejaksaan Berbasis Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB). (Semarang: CV Sanggar Krida Aditama, 2019)

Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. (Jakarta:
Buana Populer, 2009)

..... Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional
Menurut UUD 1945.

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Alfitrah. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012)

Effendy Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)

FHUI, Tim MaPPI. Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)

Hamza, Andi. Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2000.

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

Johan, Bahri. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Kristina, Yudi. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. (Jakarta: Epistema Institute, 2018)

Muhammad, Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. (Surabaya: Laksabang Justitia, 2014)

Mas, Marwan. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

MD, Mahfud. Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010)

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Atjara Pidana di Indonesia. (Jakarta: Sumur Bandung, 1962)

Ridman. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)

Rm Surachman dan Andi Hamzah. Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Surachman dan Jan S. Maringka. Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Theja, Hendra Setyawan. Analisa Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020. (Surabaya: CV Global Pres, 2021)

Jurnal dan Karya Ilmiah

Brando Aiba, Tommy F. Sumakul dan Grace M. Karwul. 2021. "Kedudukan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 2.

Badiklat Kejaksaan RI. 2021. "Modul Tusi dan Tugas, Fungsi dan Administrasi Bidang Datun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK)".

Badiklat Kejaksaan RI. 2021. “Modul Tusi dan Tugas, Fungsi dan Administrasi Bidang Tindak Pidana Umum. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK)”.

Badiklat Kejaksaan RI. 2021. “Modul Tusi dan Tugas, Fungsi dan Administrasi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK)”.

Badiklat Kejaksaan RI. 2021. “Modul Tusi dan Tugas, Fungsi dan Administrasi Bidang Tindak Pidana Khusus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK)”.

Badiklat Kejaksaan RI. 2021. “Modul Tusi dan Tugas, Fungsi dan Administrasi Bidang Intelijen Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK)”.

De La, Mustakim. 2004. “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. *Jurnal Linear*. Vol 02 No. 01.

Egi Purnowo Aji. 2021. “Pengejawantahan Penegakan Hukum Lembaga Kejaksaan: Reposisi Kedudukan Kejaksaan secara Konstitusional sebagai Main State Organ”. *Advokat Konstitusi*.

Effendi, Thalib. 2012. “Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam KUHAP”. *Jurnal Media Hukum*, Vol 19, No 1.

Galih Hertanto Putra Sukinta dan Bambang Dwi Baskoro. 2012. “Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”. *Diponegoro Law Review*, Vol 1, No 4.

Ook Mufrohim dan Ratna Herawati. 2020. “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3.

Rosita, Dian. 2018. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Ius Constituendum*. Vol 3 No 1.

Sanusi dan Lorent Pradini Imso. 2019. “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”. *Diktum: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1.

Sinulingga Widha. 2016. “Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.

Lampiran Perja No. PER-025/A/JA/11/2015.

Internet

Asshiddiqie, Jimly. “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”

http://jimly.com/makalah/namafile/39/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia. <https://www.kejaksaan.go.id/>.

Indriyanto Seno Adji. “Kejaksaan Agung dan eksistensi Konstitusional”
<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0406/22/opini/1097980.htm>

LAMPIRAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG
JL. Raya Ngampin No.104 Ambarawa 50614
Telp. (0298) 591016 Fax. (0298) 591070. www.kejari-semarangkab.go.id

Nomor : B-69C /M.3.42/Cp.2/4/2022 Ambarawa, April 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset / Penelitian

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
DI- SEMARANG

Memenuhi surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Nomor : 384/UN7.5.1.2/DL/2022 tanggal 20 April 2022 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tidak keberatan atas Permohonan izin Riset / Penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sudarto, S.H
Tembalang Semarang KodePos 50271
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 76918201
www.fh.undip.ac.id | email: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 3841/UN7.5.1.2/DL/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

20 APR 2022

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
Jl. Raya Ngampin No. 104
Ambarawa

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Gilberd Hutagalung
NIM : 11000118140299
alamat : JL. Baskoro Raya No. 36
nomor HP : 087847460444
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Surut Jawaban Riset/ Penelitian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP-196711191993032002

Surat Permohonan Riset/ Penelitian